

**Teologi Politik sebagai Hermeneutik Menurut Dorothee Soelle:
Sumbangan Pemikiran Dorothee Soelle dalam Konteks Gereja dan
Masyarakat Indonesia**



SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S-1 Fakultas
Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Oleh

Abdiella Widya Puspitasari

01150047

PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

Teologi Politik sebagai Hermeneutik Menurut Dorothee Soelle:
Sumbangan Pemikiran Dorothee Soelle dalam Konteks Gereja dan Masyarakat Indonesia

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S-1 Fakultas
Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Oleh

Abdiella Widya Puspitasari

01150047

PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TEOLOGI POLITIK SEBAGAI HERMENEUTIK MENURUT DOROTHEE SOELLE:
SUMBANGAN PEMIKIRAN DOROTHEE SOELLE DALAM KONTEKS GEREJA DAN
MASYARAKAT INDONESIA

telah diajukan dan dipertahankan oleh:
ABDIELLA WIDYA PUSPITASARI
01150047

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi
Fakultas Teologi
Universitas Kristen Duta Wacana
dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains
Teologi pada tanggal 1 Agustus 2019

- | Nama Dosen | Tanda Tangan |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., Ph.D
(Dosen Pembimbing/Penguji) |  |
| 2. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D
(Dosen Penguji) |  |
| 3. Pdt. Prof. Dr. (h.c) Emanuel Gerrit Singgih, Ph.D
(Dosen Penguji) |  |

DUTA WACANA

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

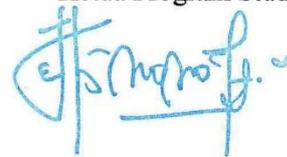
Disahkan Oleh:

Dekan,




Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D

Ketua Program Studi,



Pdt. Jeniffer Fresy Porielly Wowor, M.A

KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah, Sang Sumber Kehidupan yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menemukan butir-butir mutiara yang indah dalam perjalanan kehidupan ini, khususnya di dalam proses studi di Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana. Salah satu butir mutiara indah tersebut ada dalam karya tugas akhir ini, yakni kesadaran bahwa sebuah realitas sosial-politik bukan berada di luar gereja, atau juga sebaliknya, gereja bukan berada di luar dunia, melainkan gereja berada di dalam dunia. Penemuan butir tersebut dibantu oleh pengalaman sekaligus perjumpaan dengan realitas kemiskinan yang selalu tersaji ketika penulis melaksanakan praktek kejangkitan. Seringkali orang miskin menganggap dirinya cukup ketika telah memberikan bantuan, begitu pula gereja, terkadang merasa cukup ketika telah mampu memberikan bantuan secara materi terhadap orang-orang miskin. Dalam penelitian karya tugas akhir, penulis belajar bahwa gereja yang merasa dirinya cukup dengan bantuan, secara tidak langsung, gereja sedang memosisikan diri sebagai yang di luar, jauh dan berbeda dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, ruang politis yang di dalamnya terdapat persoalan kemanusiaan, hanya dilihat sebagai obyek yang perlu didatangi oleh gereja untuk dibantu oleh gereja dalam menyelesaikan masalah. Namun, dalam realitas nyatanya, nampaknya orang-orang miskin membutuhkan solidaritas gereja yang lebih daripada itu. Keberpihakan yang nyata sekaligus menjadi rekan yang menopang dan kebersamaan menjadi kebutuhan yang pokok bagi persoalan kemanusiaan yang ada di sekitar gereja. Hal ini tentu senada dengan tugas perutusan sebagai orang Kristen yang dipanggil untukewartakan Yesus yangewartakan Kerajaan Allah di dunia ini.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan maupun saudara yang telah mendukung saya, baik melalui diskusi, dana, daya dan doa. *Last but of course not least*, ucapan terima kasih dalam rangkaian bunga syukur saya sampaikan kepada:

1. Mama, Papa, Adik, Kakak dan Chenchen yang selalu memberikan dukungan semangat, yang terwujud dalam bentuk doa, percakapan via *whatsapp*, bahkan juga dana.
2. Pdt. Wahyu Satria Wibowo selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan rendah hati menemani perjalanan penulisan karya tugas akhir ini, memberikan masukan-masukan yang positif serta diskusi-diskusi yang semakin mempertajam pemikiran penulis.
3. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja selaku dosen wali yang sejak semester 6 telah mendorong anak walinya untuk memikirkan topik tugas akhir, serta secara terbuka menyediakan diri

untuk mendengarkan setiap kebingungan dan keluh kesah anak walinya terkait perkuliahan. Lebih lagi, beliau telah bersedia untuk menjadi rekan diskusi bagi karya tugas akhir ini sehingga horizon pengetahuan penulis semakin diperkaya.

4. Pdt. Emanuel Gerrit Singgih selaku dosen penguji yang memberikan masukan pada saat sidang skripsi sehingga penulis semakin diperkaya.
5. Pdt. Jozef M.N. Hehanussa selaku dosen bimbingan proposal yang mendorong penulis untuk memikirkan topik tugas akhir secara lebih komprehensif melalui pertanyaan-pertanyaan di kelas.
6. Teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia berbagi suka duka dalam perjalanan kehidupan akademik di Yogyakarta sekaligus menjadi rekan dalam berdiskusi.
7. Teman-teman PM GKJW Diaspora yang terkadang menjengkelkan tetapi juga selalu siap sedia memberikan bantuan terkait perkuliahan. Terlebih, Pendeta yang sedang studi di Yogyakarta sangat membantu dalam perjalanan akademik ini.
8. Kontrakan "A" yang selalu ribut dan tiada hentinya menggoda.
9. Andrey Lodewyk Aristo Kabuhung yang dengan setia menemani (sampai akhir), membimbing, bersedia mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat tiada henti, serta menjadi rekan diskusi yang hangat sekaligus dingin. Akhirnya, kita lulus bareengggggg!!
10. Majelis Agung Sinode GKJW sekaligus seluruh warga jemaat GKJW atas bantuannya melalui daya dan dana sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik di Fakultas Teologi.

Semoga karya tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh pembaca, gereja-gereja di Indonesia (secara khusus GKJW), serta kepada adik-adik atau rekan-rekan yang sedang memiliki keseriusan dalam studi mengenai teologi politik. Terima kasih! Tuhan membersamai kita selalu.

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Abdiella Widya Puspitasari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
Pernyataan Integritas	Error! Bookmark not defined.
Bab 1 <u>P</u> endahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Judul.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
Bab 2 <u>D</u> orothee Soelle dan Konteks Kehidupannya	11
2.1 Pengantar	11
2.2 Riwayat Dorothee Soelle	11
2.2.1 Masa Kecil Dorothee Soelle	11
2.2.2 Masa Remaja Soelle serta Pergulatannya Pada Masa Perang Dunia II.....	12
2.2.3 Pendidikan Dorothee Soelle	14
2.2.4 Karir dan Karya Dorothee Soelle	15
2.2.5 Keterlibatan dalam Gerakan Pembebasan	17
2.2.6 Akhir Hidup Dorothee Soelle	20
2.3 Konteks Munculnya Teologi Politik Dorothee Soelle	21
2.4 Kesimpulan	24
Bab 3 <u>T</u> eologi Politik Dorothee Soelle	25
3.1 Pengantar	25
3.2 Berpindah dari Teologi Eksistensialis	26
3.3 Gambaran Allah	29
3.3.1 Kristologi	30
3.3.2 Kerajaan Allah.....	32
3.4 Teologi Pembebasan	33

3.5	Teologi Mistik.....	35
3.6	Teologi Politik Sebagai Hermeneutik.....	37
3.7	Kesimpulan	42
Bab 4 Tinjauan Terhadap Pemikiran Dorothee Soelle dan Relevansinya Bagi Konteks Indonesia		
.....		43
4.1	Pengantar	43
4.2	Tinjauan Terhadap Teologi Politik Dorothee Soelle	43
4.2.1	Berpindah dari Teologi Eksistensialis	44
4.2.2	Teologi Politik sebagai Hermeneutik	45
4.2.3	Mungkinkah Teologi Lepas dari Politik?	47
4.3	Relevansi bagi Gereja-gereja di Indonesia	47
4.3.1	Konteks Indonesia	47
4.3.2	Teologi Politik bagi Konteks Indonesia	52
4.4	Kesimpulan	55
Bab 5 Kesimpulan		56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	57
Daftar Pustaka		59

© UKDW

PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdiella Widya Puspitasari

NIM : 01150047

Judul Skripsi : Teologi Politik sebagai Hermeneutik Menurut Dorothee Soelle: Sumbangan
Pemikiran Dorothee Soelle dalam Konteks Gereja dan Masyarakat Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua catatan referensi yang jelas telah dituliskan bagi setiap penggunaan pemikiran orang lain atau tulisan orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa bagi semua pihak.

Yogyakarta, 7 Agustus 2019

Penyusun,



Abdiella Widya Puspitasari

© UKDW

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Politik bukan merupakan hal yang asing bagi banyak orang. Perbincangan tentang politik telah mewarnai berbagai segi kehidupan. Berdasarkan pengertiannya, politik memiliki arti yang luas yang tidak hanya terbatas pada pengertian politik kepentingan, perebutan kekuasaan, maupun politik praktis. Ditinjau secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani “*polis*” yang berarti kota. Secara luas, dapat dipahami sebagai penggunaan kekuatan untuk mengatur masyarakat atau komunitas.¹ Apapun yang dilakukan individu/sekelompok orang yang berkaitan dengan penataan masyarakat demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat disebut sebagai politik. Dengan demikian, menjadi wajar ketika politik menembus segala segi kehidupan, khususnya politik mendapat kesempatan untuk membantu negara mengatur kehidupan masyarakat. Di sisi lain, mengapa dengan berdasar pada arti politik yang luas, gereja tampak memisahkan diri dari perbincangan politik?

Tak bisa dipungkiri apabila ada sebagian gereja yang enggan untuk terlibat dalam perbincangan politik. Sekalipun ada yang bersedia, terkadang hanya sebatas perbincangan mengenai hak-hak politik sebagai orang beragama, seperti hak untuk mengabarkan wahyu Allah, mendirikan rumah ibadah, atau juga karena ada hasrat untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat luas dengan alasan kondisi sosial-politik yang khaos. Keinginan tersebut diwujudkan melalui upaya mendapatkan kekuasaan dan dengan begitu, asumsinya, akan dapat mengendalikan masyarakat. Kini yang menjadi pertanyaan, apakah peran politis gereja semata-mata hanya bisa diwujudkan melalui raihan kekuasaan, struktur sosial? Hasrat tersebut tentu baik, akan tetapi patut untuk ditinjau kembali, apakah kepentingan yang dibawa benar-benar murni untuk kepentingan bersama dan dengan tujuan yang baik?

Ada beberapa kemungkinan yang menjadikan gereja seolah-olah memisahkan diri dari perbincangan politik. *Pertama*, politik kerap menggunakan agama sebagai alat legitimasi ideologi seseorang/sekelompok orang untuk pengertian yang sempit (politik praktis), meraih kekuasaan dalam struktur sosial. Hal ini bukan saja baru terjadi di masa kini, melainkan sudah sejak masa lalu. Gereja bisa menengarai sejak agama Kristen menjadi agama negara di kekaisaran Roma. Oleh karena itu, *kedua*, politik dianggap kotor sebab kepentingan politik praktis menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan dan itu hanya untuk memenuhi

¹ William Cavanaugh & Peter Scott, *Blackwell Companion to Political Theology*, Introduction, William Cavanaugh & Peter Scott (Eds.), (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), h. 1.

kepentingan dirinya sendiri. Dampaknya, *ketiga*, kesejahteraan masyarakat tidak terjamin. Justru yang ditunjukkan adalah pemenuhan terhadap kepentingan golongan/individu tertentu. *Keempat*, politik merupakan urusan di ruang publik di luar gereja, sedangkan gereja berurusan dengan perihal peribadahan, hubungan manusia dengan Yang Ilahi. Gereja dianggap tidak bersifat politis.

Dari kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat ditengarai bahwa ternyata oleh karena gereja memahami dengan cara seperti itu –dalam artian yang sempit, di mana politik sebatas pada konsep politik partisan– maka gereja benar-benar terpisah dari kondisi politik. Gereja tidak lagi menjadi bagian yang integral dari kondisi politik. Seolah-olah memisahkan diri dari perbincangan politik. Lalu apakah pengertian politik secara luas benar-benar tidak bisa dijadikan sebagai ruang berteologi atau berefleksi? Apakah gereja sama sekali tidak memiliki titik singgung dengan politik? Apakah gereja tidak layak bila disandingkan dengan politik?

Negara dan gereja merupakan lembaga otonom. Namun, negara hadir bukan untuk dirinya sendiri sehingga negara memerlukan politik guna membantu dan mengatur masyarakat. Demikian juga halnya dengan gereja yang dipanggil untuk hadir di tengah dunia bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Karya dan pelayanan gereja berurusan dengan sepenuhnya kesejahteraan, kasih, perdamaian dan keadilan manusia dan alam semesta dalam sebuah konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya tertentu.² Pewujudnyataan itu hanya bisa dilakukan oleh gereja dalam ranah politik, terlibat dalam kebijakan-kebijakan publik.³ Gereja bisa menjadi panduan bagi jalannya politik. Berdasarkan hal tersebut, maka gereja dengan politik memiliki titik singgung. Sekalipun merupakan lembaga yang otonom, tetapi gereja dan politik memiliki hubungan yang dialektis. Jika gereja masih berusaha menghindari politik karena politik itu kotor, lalu bagaimana berita-berita yang berhubungan dengan kesejahteraan umat dan alam semesta dapat disuarakan? Untuk itu gereja perlu menjadikan ruang politik sebagai ruang untuk gereja berteologi dan berefleksi. Gereja perlu secara terus menerus merefleksikan kiprahnya di bidang politik.⁴

Kesadaran bahwa ruang politik dapat digunakan sebagai lokus berteologi, mendorong gereja untuk merumuskan teologi politik. Teologi politik bukan dimaksudkan sebagai teologi yang berbicara mengenai politik maupun teologi yang bertukar isinya dengan ilmu politik. Teologi politik dalam hal ini adalah analisis dan kritik terhadap pengaturan politik (termasuk

² Wahyu S. Wibowo, *Gereja dan Politik*, 2009, dalam https://www.academia.edu/12172136/GEREJA_DAN_POLITIK, diakses pada tanggal 8 Februari 2019.

³ Wahyu S. Wibowo, *Gereja dan Politik*, 2009, dalam https://www.academia.edu/12172136/GEREJA_DAN_POLITIK, diakses pada tanggal 8 Februari 2019.

⁴ Wahyu S. Wibowo, *Gereja dan Politik*, 2009, dalam https://www.academia.edu/12172136/GEREJA_DAN_POLITIK, diakses pada tanggal 8 Februari 2019.

aspek budaya-psikologis, sosial dan ekonomi) berdasarkan cara-cara Allah menyelenggarakan dunia.⁵ Tentunya analisis dan kritik yang diberikan tidak secara naif. Dengan demikian ‘teologi’ dimaknai sebagai proses yang berkelanjutan secara disiplin didukung dengan doa, yang melaluinya jemaat mencari pengertian mengenai apa yang ia percayai, dan itu memandunya untuk hidup secara konkret dalam kepercayaannya.⁶

Ada beberapa fenomena yang memperlihatkan bahwa gereja-gereja di Indonesia telah berusaha untuk merumuskan teologi politiknya. Menyesuaikan diri dengan setiap kebijakan publik dan menjadikan ruang politik sebagai ruang berteologi. Misalnya saja, isu LGBT yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, di mana banyak orang yang menolak keberadaan kaum LGBT. Ada alasan-alasan yang dimunculkan di balik sikap penolakan tersebut, sebut saja, karena tidak wajar ketika seseorang saling suka terhadap sesama jenis dan tidak ada ajaran agama yang mengatakan bahwa hal itu baik. Indonesia yang dianggap sebagai negara religius, menyikapi hal itu dengan mengeluarkan kebijakan, bila mereka hendak menikah tidak akan dilayani oleh negara. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (selanjutnya akan disebut PGI) yang mewakili beberapa gereja di Indonesia memberikan tanggapan dengan mengeluarkan sebuah surat pastoral untuk tidak mendiskriminasi kaum LGBT, sebab manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah, serta PGI juga bersedia untuk memperjuangkan hak-hak kaum LGBT.⁷ Pernyataan tersebut tentu menimbulkan beragam reaksi, akan tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa gereja mulai berani mengangkat isu LGBT dalam ruang publik. Memberikan analisis dan kritik terhadap pengaturan politik sebagai jalan untuk mencapai tujuan negara.

Situasi politik di Indonesia tengah memperbincangkan mengenai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, sudah ada gereja yang berani mengangkat tema mengenai politik untuk diperbincangkan di dalam gereja. Mengundang para calon legislatif untuk diberi pembekalan, memberikan himbauan baik kepada calon legislatif maupun jemaat. Khotbah-khotbah di atas mimbar yang merupakan hasil refleksi dari sang pengkhotbah juga tak jarang melibatkan wacana politik.

Dari fenomena tersebut, setidaknya kita bisa melihat bagaimana gereja mengelola teologi politiknya. Isu LGBT sebenarnya bukan merupakan isu yang baru terjadi. Namun keberanian untuk mengangkat isu tersebut baru terjadi pada beberapa dekade terakhir, yang mana isu tersebut semakin ramai diperbincangkan. Kemudian berkaitan dengan politik praktis, gereja berani untuk mengangkat isu tersebut, mengajak jemaat berefleksi dari situasi politik praktis.

⁵ William Cavanaugh & Peter Scott, *Blackwell Companion to Political Theology*, Introduction, h. 1.

⁶ Wahyu S. Wibowo, *Gereja dan Politik*, 2009, dalam https://www.academia.edu/12172136/GEREJA_DAN_POLITIK, diakses pada tanggal 8 Februari 2019.

⁷ PGI, *Pernyataan Pastoral PGI tentang LGBT*, (Jakarta: PGI, 2016), h. 4.

Usaha yang dilakukan oleh gereja untuk berani mengangkat isu yang sedang ramai diperbincangkan menandai bahwa gereja telah sadar untuk melibatkan wacana politik sebagai lokus berteologi. Gereja menunjukkan keterbukaannya terhadap situasi politik yang sedang terjadi. Meskipun keterbukaan tersebut masih terbatas terhadap isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dan menyita perhatian publik.

Gereja perlu secara terus menerus merefleksikan kembali kiprahnya dalam melibatkan situasi politik sebagai lokus berteologi. Terbuka bukan hanya pada isu-isu yang sedang menyita perhatian publik, melainkan terhadap keseluruhan ruang politik. Dengan demikian, maka gereja telah menjadikan ruang politik sebagai teks. Ketika menjadi sebuah teks, maka kita akan memperlakukan secara hermeneutis agar bisa menyingkapkan segala hal yang berkaitan dengan konteks (ruang politik tersebut). Ada banyak ruang politik di mana gereja bisa masuk untuk berteologi. Misalnya, masalah-masalah kemanusiaan, masalah kerusakan lingkungan yang mana masalah-masalah tersebut mengundang gereja untuk terlibat sekaligus berefleksi secara teologis.

1.2 Permasalahan

Masalah kemanusiaan menjadi salah satu ruang politik yang bisa dijadikan oleh gereja sebagai ruang berteologi. Kepekaan gereja terhadap situasi sosial-politik akan menentukan bagaimana peran politis yang dilakukan oleh gereja di tengah masyarakat sekaligus menunjukkan bagaimana gereja sebagai lembaga otonom yang berada di tengah dunia tetap konsisten terhadap tugas perutusanNya. Peran politis gereja dalam masyarakat luas dinilai, bukan dengan tolak ukur sejauh mana kita berhasil menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi politik nasional, melainkan bagaimana kita melayani masyarakat.⁸

Dorothee Soelle, salah seorang teolog dari Jerman masuk dalam ruang tersebut dan menggunakannya sebagai ruang untuk berteologi. Kesadarannya bahwa ruang politik sebagai ruang berteologi, juga berdasarkan pada pengalaman empiris atas kengerian Auschwitz dan keterlibatannya dalam setiap masalah kemanusiaan –khususnya dalam kelompok *Politisches Nachtgebet*- mendorong Soelle merumuskan teologi politik. Melalui kesadaran tersebut, Soelle memahami bagaimana peran politis yang semestinya dilakukan di tengah masyarakat dan peran politis tersebut diwujudkannyatakan melalui pelayanan dan pemihakan terhadap kaum yang lemah, tertindas dan menderita.

Dari pengalamannya melihat situasi pasca Auschwitz dan rangkaian keterlibatannya dalam aktivitas politik, Soelle kelak memunculkan sebuah gagasan teologi politik. Gagasan ini

⁸ Paulus Sugeng Widjaja, “Membangun Teologi Politis di Indonesia”, dalam *Gema Teologi*, edisi 59, 2004, h. 56.

berangkat melalui teologi eksistensialis Rudolf Bultmann. Mengkritik pemikiran eksistensialis Bultmann yang dinilainya terlalu individualistis hingga mengesampingkan aspek sosial-politis. Di sisi lain, ada pemikiran Bultmann yang disetujui dan kemudian diadopsi untuk mengembangkan rumusan teologi politiknya. Terlepas dari pengaruh Bultmann, Soelle juga memahami akan adanya keberatan terhadap istilah teologi politik. Dalam istilah tersebut diandaikan adanya hubungan antara iman dan politik. Sementara itu, era Konstantinus mewarisi kecurigaan terhadap hubungan keduanya. Ketika gereja sangat terlibat dalam politik, gereja mengambil peranan untuk mengatur tetapi juga mengambil tempat di antara elit politik yang seringkali menekankan pesannya sendiri.⁹ Dengan kata lain, gereja tenggelam dalam dunia, meninggalkan pesan Injilnya dan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Dari sini kemudian gereja lebih diprioritaskan agar bersikap netral. Iman lebih tinggi daripada politik. Iman berasal dari Tuhan sedangkan politik hanya buatan manusia. Anggapan itu kemudian melahirkan kesalahpahaman lain, dengan menganggap bahwa teologi politik hanyalah disiplin ilmu teologi tambahan yang terutama berkaitan dengan masalah politik atau tanggung jawab sosial orang percaya.¹⁰ Memahami setiap keberatan-keberatan tersebut, kemudian Soelle mengemukakan bahwa teologi politik bukan semata-mata pertukaran antara teologi dengan ilmu politik, bukan juga disiplin ilmu tambahan. Teologi politik merupakan sebuah hermeneutik teologis yang membuka cakrawala interpretasi di mana politik dipahami sebagai lingkup yang komprehensif dan menentukan di mana kebenaran Kristus harus menjadi sebuah praksis.¹¹ Dengan demikian teologi politik dalam kacamata Soelle merupakan teologi fundamental. Dalam artian bukan sebagai disiplin tambahan atau cabang, tetapi orientasi seluruh teologi. Dengan pengertian tersebut, teologi politik yang diusulkan Soelle menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya bagi gereja-gereja di Indonesia. Teologi politik menunjukkan bahwa iman bukan persoalan pribadi tetapi iman semestinya mendunia, memiliki dimensi kemasyarakatan. Peran politis gereja menjadi sangat jelas dan penting. Situasi sosial-politik selalu menjadi perhatian dan lokus berteologi.

Interpretasi semestinya tidak hanya terfokus pada eksistensi yang tertutup, melainkan terbuka dan menyadari akan pentingnya situasi sosial-politis. Selain itu, keberadaan eksistensi individu memang tidak pernah terlepas dari situasi sosial-politis. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi gereja. Apakah gereja selama ini benar-benar menggunakan cakrawala sosial-politis atau masih terjebak dalam kepentingan pribadinya? Apa yang dikemukakan oleh Soelle menjadi

⁹ Dorothee Soelle, *Political Theology*, (USA: Fortress Press, 1974), h. 55.

¹⁰ Dorothee Soelle, *Political Theology*, h. 58.

¹¹ Dorothee Soelle, *Political Theology*, h. 59.

penting di tengah situasi sosial-politik yang selalu berubah-ubah, yang menantang gereja untuk terus dapat mewujudkan perannya secara signifikan di tengah masyarakat. Memang dalam hal ini bukan berarti kepentingan individu harus benar-benar disingkirkan, melainkan dalam proses hermeneutis, subyektivitas individu tersebut dimasukkan ke dalam pemahaman sosial untuk mendapatkan refleksi yang berguna bagi kepentingan umum.¹² Kepentingan gereja bukan diabaikan, tetapi kepentingan tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, yang mencakup kepentingan bersama. Hanya apa yang sesuai dan dimediasi secara politis, hanya apa yang relevan dengan kehidupan setiap orang di masyarakat, dapat dianggap sebagai pemahaman.¹³ Tanpa kesadaran seperti itu, gereja akan tetap sebagai lembaga otonom yang menyangkal dunia.

Hal lain yang memungkinkan untuk dapat berlabuh pada kesadaran politik-kritis ialah kesadaran historis. Tanpa kesadaran akan sejarah, maka akan susah bagi teologi untuk lepas dari tradisi dogmatis gereja dan cenderung menghasilkan refleksi yang utopis. Kesadaran historis ini mengandaikan adanya pemahaman bahwa sebuah teks merupakan hasil dari sebuah situasi sosial-politik tertentu. Dengan demikian adanya kesadaran historis yang dapat berkembang pada kesadaran politik-kritis, akan menghasilkan sebuah refleksi iman yang kritis dan transformatif serta tentunya ditujukan pada/untuk pembebasan bagi semua orang, khususnya kaum tertindas, tersingkir, papa.

Selain berpijak pada teologi eksistensial yang dikemukakan Rudolf Bultmann, Soelle juga mendasarkan gagasan teologi politiknya pada fenomena “kematian Allah”. Tanpa itu, gagasan teologi politik Soelle bisa jadi hanya sebuah utopia. Fenomena “kematian Allah” bukan dalam artian bahwa Allah tidak ada, melainkan tidak hadir. Soelle merespons situasi tersebut, memanfaatkannya untuk berpindah dari gagasan tradisional pada sebuah gagasan yang berangkat dari pengalaman. Soelle memunculkan sebuah gagasan bahwa Allah yang tidak hadir itu kini direpresentasikan oleh Kristus yang menampilkan diri sebagai yang menderita. Allah yang ditampilkan bukan yang gagah, berkuasa tetapi turut bersama dengan orang-orang yang tertindas di tengah kekejaman Nazi dan peristiwa ketidakadilan yang lainnya.

Sekalipun teologi politik dipahami sebagai hermeneutik yang nampaknya dapat menjadikan munculnya asumsi bahwa teologi politik hanya sebagai teori, namun Soelle tetap memperlihatkan akan pentingnya praksis. Praksis menjadi pijakan untuk memperoleh sebuah refleksi teologis, sekaligus mendorong refleksi teologis melahirkan sebuah praksis baru yang sesuai dengan konteks. Praksis yang baru memiliki orientasi untuk membawa perubahan dalam

¹² Dorothee Soelle, *Political Theology*, h. 59.

¹³ Dorothee Soelle, *Political Theology*, h. 59.

masyarakat. Dengan demikian nampak ada hubungan dialektis antara teori dan praksis. Tidak pernah teori terlepas dari praksis, begitu pun sebaliknya. Oleh sebab itu, fungsi kritis dari teologi politik dapat mendobrak privatisasi agama yang terjadi di kalangan umat. Sebab iman bukanlah sesuatu yang privat.¹⁴ Iman berkaitan dengan dimensi-dimensi sosial-politis dan refleksi atas iman berhubungan dengan yang lain. Begitu pula, konteks, yang merupakan ruang untuk beteologi, juga akan berpengaruh terhadap penghayatan iman kita, maka butuh untuk ditransformasikan. Ada empat pendekatan hermeneutis yang digunakan oleh Soelle, yaitu praksis, analisis, meditasi dan praksis baru.¹⁵

Wujud nyata pemahaman Soelle mengenai teologi politik sebagai hermeneutik dapat dirasakan dalam berbagai pijar pemikiran teologisnya; dalam berbagai karya teologisnya. Meski gagasan teologi politik tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam karya-karya teologisnya, seperti dalam karya pembebasan dan mistik. Akan tetapi, nafas politis dapat ditengarai dalam hampir seluruh karya pemikirannya. Ini juga menunjukkan bahwa Soelle memiliki kekonsistenan untuk menyentuh dimensi politis dan berusaha untuk dapat menjawab persoalan dalam situasi sosial-politik tertentu. Misalnya, penghayatannya akan Allah yang direpresentasikan oleh Kristus sebagai yang menderita. Penghayatan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berangkat dari situasi tertentu yang kemudian dianalisis dan diperjumpakan dengan teks Kitab Suci. Perjumpaan itu menghasilkan refleksi teologis baru, sebut saja dalam hal ini penghayatan Allah yang menderita. Penghayatan itu kini menjadi dasar untuk sebuah praksis baru yang dapat mentransformasi kehidupan masyarakat. Gambaran Allah yang menderita dapat memberdayakan manusia yang mengalami penderitaan untuk *survive* dan menyadarkan sesama manusia lainnya bahwa Allah membutuhkan partisipasi umatNya dalam penderitaanNya. Manusia didorong untuk terlibat dalam penderitaan yang dialami sesamanya, memihak pada orang-orang yang tertindas. Loyalitas terhadap yang lemah ini memungkinkan untuk dapatewartakan berita pembebasan, menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan, memberikan saran terhadap struktur yang menindas dan menuju pada pemenuhan kerajaan Allah.

Apa yang dikemukakan oleh Soelle ini memberikan peringatan yang mengguncang bagi orang Kristen supaya mau terlibat dalam bidang politik dan merumuskan teologi politik. Teologi harus menghasut orang Kristen untuk bertindak dengan melibatkan imajinasi dan mengusulkan alternatif terhadap norma-norma sosial-politik yang berbahaya — dan itu harus benar-benar

¹⁴ Eddy Kristiyanto, *Sakramen Politik*, (Yogyakarta: Lamalera, 2008), h. xix.

¹⁵ Dorothee Soelle, *On Earth as in Heaven*, (Louisville: Westminster, 1993), h. x.

bermuara pada aksi.¹⁶ Refleksi teologi politik itu juga akan bervariasi tergantung sejauh mana ilmu-ilmu sosial dan wacana publik digunakan, dikontekstualisasikan, dan sumber-sumber teologis dilibatkan atau digunakan dalam hal-hal politik. Dengan memahami teologi politik sebagai hermeneutik, maka kepekaan terhadap situasi sosial-politik senantiasa terasah dan menjadikan gereja selalu mampu untuk memikirkan peran politisnya secara tepat di tengah masyarakat guna menuju pada pemenuhan kerajaan Allah. Juga mengandaikan bahwa teologi politik merupakan sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Melalui uraian diatas, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

Bagaimana Dorothee Soelle membangun argumentasi mengenai teologi politik sebagai hermeneutik dan bagaimana sumbangsuhnya bagi gereja dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi politik?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan terfokus pada pemikiran Dorothee Soelle mengenai teologi politik. Penulis memaknai bahwa teologi tidak bisa melepaskan dirinya dari bidang politik. Sebab, politik menjadi salah satu ruang bagi teologi untuk mengaktualisasikan ajarannya dan menyuarakan suara kenabian –keadilan, kasih, perdamaian, pembebasan. Dalam upaya untuk mendeskripsikan pemikiran Soelle mengenai teologi politik, maka buku *Political Theology* akan menjadi sumber kajian utama. Selain itu, penulis juga akan menggunakan buku-buku Dorothee Soelle yang lainnya, seperti *Thinking About God*, *Against the Wind*, *Choosing Life*, *Silent Cry*, dan ada beberapa yang lainnya. Untuk menarik gagasan teologi politik Soelle pada ranah yang lebih luas. Hal ini dikarenakan pijar-pijar pemikirannya mengenai teologi politik juga tersebar dalam buku-buku yang lain. Nafas politis yang ada dalam diri Soelle dihembuskan dalam hampir seluruh karya teologisnya.

Ada banyak teolog yang berbicara mengenai teologi politik. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis lebih memilih untuk menggali dan mengulas teologi politik dari Dorothee Soelle dikarenakan beberapa alasan. Pertama, Soelle sedikit berbeda dengan teolog lainnya, yang memulai diskursus mengenai teologi politik dengan berangkat dari teologi eksistensialis Rudolf Bultmann. Pijakan ini menjadikan gagasan teologi politik dipahami sebagai sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Sebagai hermeneutik, situasi sosial-politik akan selalu menjadi perhatian dan lokus berteologi. Hal ini dapat menjadi kontribusi bagi gereja-gereja di Indonesia yang masih menganggap bahwa produksi teologi terpisah dari situasi sosial-politik sehingga tak jarang

¹⁶ Dannis M. Matteson, ““Hope Requires Participants”: Dorothee Soelle’s Warning and Task for Political Theology in the Trump Era”, dalam *New Theology Review*, Vol. 30, No. 2, Maret 2018, h. 30.

teologi politik hanya dipahami sebagai sebuah teori yang mencari program konkret dari iman. Kedua, pembahasan mengenai teologi politik menurut Dorothee Soelle di Indonesia masih jarang.

1.4 Judul

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang penulis angkat, maka narasi judul yang dipilih penulis:

Teologi Politik sebagai Hermeneutik Menurut Dorothee Soelle: Sumbangan Pemikiran Dorothee Soelle dalam Konteks Gereja dan Masyarakat Indonesia

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pemikiran Dorothee Soelle tentang teologi politik sebagai hermeneutik sekaligus sumbangsih pemikiran Dorothee Soelle bagi gereja dan masyarakat Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dengan maksud, selain (tentunya) mendeskripsikan pemikiran Dorothee Soelle terkait teologi politik, juga akan sangat penting memberikan analisa terhadap pemikiran Soelle terkait mengapa dan bagaimana cara pandang yang digunakan untuk mengintegrasikan teologi dan politik. Sebagai pendukung upaya mendeskripsikan dan menganalisa, maka penulis akan menggunakan studi kepustakaan. Penulis menginventarisasi karya-karya Dorothee Soelle terutama yang berkaitan dengan teologi politik, khususnya *Political Theology*, sebagai sumber primer. Serta karya dari tokoh yang lain yang terkait dengan topik yang diangkat penulis, sebagai sumber sekunder guna mempertajam pembahasan mengenai topik ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Dorothee Soelle dan Konteks Kehidupannya

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan mengenai siapa Dorothee Soelle, bagaimana konteks kehidupan Dorothee Soelle pada saat itu hingga mempengaruhi dirinya merumuskan teologi politik.

Bab 3 Teologi Politik dari Dorothee Soelle

Dalam bagian ini penulis akan menguraikan bagaimana pemikiran Dorothee Soelle terkait teologi politik, khususnya bagaimana Dorothee Soelle membangun argumentasinya terkait teologi politik sebagai hermeneutik. Secara khusus pemaparan dalam bab ini akan terfokus pada tulisan Dorothee Soelle, *Political Theology*.

Bab 4 Tinjauan dan Relevansi Teologi Politik Dorothee Soelle

Dalam bagian ini, sebagai upaya penulis melihat secara analitis, maka penulis akan meninjau argumentasi teologi politik Dorothee Soelle dengan menggunakan pemikiran tokoh-tokoh lainnya maupun dari penulis sendiri. Selain itu, penulis juga akan menuliskan relevansi pemikiran Soelle dalam konteks Indonesia.

Bab 5 Kesimpulan

Bagian ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan jika dimungkinkan akan diberikan saran-saran yang konstruktif.

Bab 5

Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Perang dunia II meninggalkan jejak dalam ingatan banyak orang. Realitas penderitaan yang begitu masif, penindasan yang tidak terbendung menjadikan banyak orang mengalami kegelisahan, termasuk Soelle. Gereja dan orang-orang yang diam terhadap situasi Jerman saat itu. Penyebab sikap diam dari Gereja dan orang-orang Jerman diperolehnya ketika ia membaca buku harian milik Anne Frank yang menceritakan kekejaman Nazi. Berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi Jerman kala itu, Soelle menyadari akan pentingnya perhatian pada situasi sosial-politik. Bagi Soelle, individualitas inilah yang harus diatasi. Situasi sosial-politik tidak pernah bisa jika diabaikan. Ketika gereja dan orang Jerman hanya diam, ini menunjukkan antara teologi dan politik dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Bagi Soelle, antara teologi dan politik tidak bisa dipisahkan. Teologi harus selalu berdimensi politis.

Melewati pemikiran Bultmann Soelle mengkritik sikap individual tersebut dan kemudian mendarat pada gagasan mengenai teologi politik. Soelle menggunakan pemikiran Bultmann mengenai historis kritis dan eksistensialis. Soelle menyetujui metode historis kritis yang dikemukakan Bultmann yang digunakan untuk membebaskan teks Alkitab dari gambaran mitologi yang menutupinya. Hanya saja, metode historis kritis ini hanya dikaitkan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Metode ini hanya digunakan sebagai alat untuk memperoleh makna dari sebuah teks. Soelle ingin melampaui hal tersebut. Bagi Soelle, dengan adanya kesadaran historis itu dapat berkembang menjadi kesadaran politis. Kesadaran historis jika setia pada semangat awal Pencerahan, maka akan dimediasi ke masa kini. Sebab metode ini digunakan untuk mengkritik tradisi sekaligus institusi. Dari sini kemudian Soelle mengatakan bahwa kesadaran historis pada dasarnya akan berkembang menjadi kesadaran politik.

Bultmann tidak hanya menggunakan metode historis kritis untuk sampai pada upaya untuk mengkomunikasikan teks kepada masyarakat modern. Bultmann menggunakan pemikiran eksistensialis. Makna yang diperoleh tersebut diperjumpakan dengan eksistensi individu dan menuntut keputusan eksistensial dari individu tersebut. Pemahaman ini dikritik oleh Soelle. Ketika eksistensi hanya terbatas pada diri sendiri, individu itu sendiri, maka situasi sosial-politik akan diabaikan. Ini persis dengan apa yang terjadi di Jerman dan kesadaran Soelle itu juga memang didasarkan pada realitas Jerman kala itu. Bagi Soelle, keberadaan individu tidak pernah terlepas dari situasi sosial-politik yang ada disekitarnya. Bahkan keputusan eksistensial yang

diambil oleh individu selalu terkait dengan pola perilaku sosial. Dengan demikian, situasi sosial-politik tidak dapat diabaikan. Kita harus selalu membawa dimensi sosial-politis tersebut ke dalam wacana teologi.

Dari pemahaman diatas kemudian Soelle berlabuh pada teologi politik sebagai hermeneutik. Teologi politik sebagai hermeneutik bukan mengandaikan tindakan konkret yang dilandaskan pada iman, melainkan membuka cakrawala interpretasi di mana situasi politis merupakan bidang untuk kebenaran Kristen dinyatakan dan menjadi sebuah praksis. Situasi sosial-politis menjadi lokus berteologi. Dengan demikian, persoalan yang terjadi di masyarakat akan selalu menjadi perhatian dan direfleksikan secara terus menerus. Teologi akan selalu memiliki dampak bagi semua orang. Sebagai hermeneutik, teologi politik ini merupakan sebuah proses yang tidak pernah berhenti.

Dari pemahaman tersebut, penulis melihat bahwa gagasan itu sebaiknya diperhatikan oleh gereja-gereja di Indonesia. Pemahaman Soelle mengenai teologi politik sebagai hermeneutik menunjukkan betapa pentingnya situasi sosial-politik untuk dijadikan sebagai ruang berteologi. Gereja tidak bisa abai terhadap situasi sosial-politik. Teologi bukan hanya menyangkut abstraksi melainkan dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan situasi sosial-politik. Dengan menyadari secara penuh pentingnya perhatian pada situasi sosial-politik, bukan tidak mungkin gereja-gereja di Indonesia akan menyatakan keberpihakannya kepada orang miskin.

5.2 Saran

Berdasarkan pada uraian mengenai realitas sosial-politik yang dihadapi oleh gereja seperti globalisasi ekonomi dan revolusi industri 4.0 yang memberikan dampak terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat khususnya berdampak pada persoalan perekonomian, adanya kesenjangan sosial, orang-orang yang nantinya akan terpinggirkan akibat kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0, maka akan sangat baik bagi gereja-gereja untuk memperhatikan gagasan Soelle mengenai teologi politik sebagai hermeneutik sebagai upaya untuk menghadapi situasi globalisasi dan revolusi industri 4.0. Globalisasi dan revolusi industri 4.0 adalah situasi dimana gereja juga berada di dalamnya. Oleh sebab itu, gereja perlu untuk memikirkan peran politisnya di tengah situasi tersebut dengan melahirkan sebuah refleksi dan tindakan yang terintegrasi dengan situasi sosial-politik. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang ditujukan penulis kepada gereja-gereja di Indonesia.

1. Sebagai sebuah lembaga, gereja perlu menyadari bahwa keberadaannya tidak terlepas dari realitas sosial-politik. Oleh sebab itu, gereja janganlah memosisikan diri sebagai lembaga

yang terpisah dari realitas dunia. gereja mestinya terlibat dalam realitas dunia. Dalam kaitannya dengan globalisasi dan revolusi industri 4.0, gereja perlu memikirkan secara jernih bentuk refleksi dan tindakan yang terintegrasi dengan situasi tersebut.

2. Peran politis gereja tidak hanya terbatas pada ranah struktur pemerintahan, tetapi peran politis gereja sejauh gereja mau memberikan dirinya untuk melayani dan memiliki loyalitas dengan kaum miskin, orang-orang yang terdiskriminasi, terpinggirkan. Orang-orang yang miskin dan terdiskriminasi sebaiknya tidak dipahami sebagai yang berada di luar realitas gereja.
3. Situasi sosial-politis bukan merupakan situasi yang sama sekali terpisah dari keberadaan gereja. Justru gereja ada dan berada dalam situasi tersebut. Oleh sebab itu, situasi sosial-politis bukan tidak mungkin dijadikan sebagai lokus berteologi. Di sisi lain, kesadaran bahwa gereja berada dalam situasi sosial-politis, maka paradigma gereja terhadap yang lain sebaiknya bukan sebagai subyek-obyek melainkan subyek-subyek.

© UKDW

Daftar Pustaka

Buku

- Banawiratma, J.B. & Muller, J., *Berteologi Sosial Lintas Ilmu*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Banawiratma, J.B., *Petruk dan MEA: Lakon Liberatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Cavanaugh, William & Scott, Peter, *Blackwell Companion to Political Theology*, Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
- Hadiwijono, Harun, *Teologi Reformatoris Abad ke 20*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Kleden, Paulus Budi, *Teologi Terlibat*, Maumere: Ledalero, 2003.
- Kristiyanto, Eddy, *Sakramen Politik*, Yogyakarta: Lamalera, 2008.
- PGI, *Pernyataan Pastoral PGI tentang LGBT*, Jakarta: PGI, 2016.
- Pieris, Aloysius, *Berteologi dalam Konteks Asia*, terj. Agus M. Hardjana, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Schwab, Klaus, *Revolusi Industri Keempat*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Soelle, Dorothee, *Christ as the Representative*, Philadelphia: Fortress, 1967.
- Soelle, Dorothee, *Political Theology*, USA: Fortress Press, 1974.
- Soelle, Dorothee, *Thinking About God*, London: SCM Press, 1990.
- Soelle, Dorothee, *On Earth as in Heaven*, Louisville: Westminster, 1993.
- Soelle, Dorothee, *Against the Wind*, Minneapolis: Fortress Press, 1999.
- Soelle, Dorothee, *The Silent Cry: Mysticism and Resistance*, Minneapolis: Fortress Press, 2001.
- Winarno, Budi, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Wind, Renate, *Dorothee Soelle –Mystic and Rebel*, Minneapolis: Fortress Press, 2012.

Jurnal

- Adeney-Risakotta, "Membangun Teologi Politis di Indonesia", dalam *Gema Teologi*, edisi 59, 2004.
- DioGuardi, Shirley Cloyes, "Mystic and Rebel –The Pathbreaking Journey of Dorothee Soelle", dalam *Theology Today*, Vol. 70, 2013.
- Harvey, Ann-Marie, "Dorothee Soelle: In Memoriam", dalam *Pacifica*, Vol 17, No. 1, 2004.
- Hawkins, Nancy, "Dorothee Soelle: Radical Christian, Mystic in Our Midst", dalam *The Way*, Vol. 44, No. 3, 2005.
- Hawkins, Nancy, "Dorothee Soelle and Meister Eckhart: Learning to Live Without a Why" dalam *Eckhart Review*, Vol. 18, No. 1, 2009.

Hockenos, Matthew, "The Church Struggle and the Confessing Church: An Introduction to Bonhoeffer's Context", dalam *Studies In Christian-Jewish Relation*, Vol 2, No 1, 2007.

Manglaviti, Leo M., "Suffering and Liberation in Dorothee Soelle's Political Theology", dalam *Budhi*, Vol. 2, No. 2, 1998.

Matteson, Dannis M., "'Hope Requires Participants': Dorothee Soelle's Warning and Task for Political Theology in the Trump Era", dalam *New Theology Review*, Vol. 30, No. 2, 2018.

Prasetyantha, Y.B., "Refleksi Teologis Dietrich Bonhoeffer Melawan Sepak Terjang Nazi-Hitler", dalam *Orientasi Baru*, Vol. 26, No. 02, 2017.

Widjaja, Paulus Sugeng, "Membangun Teologi Politis di Indonesia", dalam *Gema Teologi*, edisi 59, 2004.

Wijaya, Yahya, "Teologi dan Politik", dalam *Gema Teologi*, edisi 59, 2004.

Kementerian Perindustrian, *Making Indonesia 4.0*.

Internet

Making Indonesia 4.0: Strategi RI Masuki Revolusi Industri Ke 4, dalam <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1548/gini-ratio-september-2018-tercatat-sebesar-0-384.html>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

<https://www.weforum.org/agenda/2019/04/an-economist-explains-the-pros-and-cons-of-globalization-b2f0f4ae76/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2019.

Final Solution Overview, dalam <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/final-solution-overview>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

Introduction to the Holocaust, dalam <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/introduction-to-the-holocaust?series=48576>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

Sucahyo, Nurhadi, *Harga Anjlok, Peternak Yogyakarta Bagikan Ribuan Ayam Gratis*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/harga-anjlok-peternak-yogyakarta-bagikan-ribuan-ayam-gratis/4974416.html>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

Wibowo, Wahyu S., *Gereja dan Politik*, dalam https://www.academia.edu/12172136/GEREJA_DAN_POLITIK, 2009, diakses pada tanggal 8 Februari 2019.

World War II in Europe, dalam <https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/world-war-ii-in-europe-abridged-article>, diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

© UKDW